

Peran Pelatihan Akuntansi Terhadap Penerapan Isak 35 Pada Yayasan Keagamaan Di Indonesia

Wulan Ramadhani¹, Thania Dwi Safiqha², Siltia³, Putri Andini⁴, Vio Martin⁵

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Barat¹²³⁴⁵

Email : wulanrmd0505@gmail.com¹; thaniadwisafiqha45@gmail.com²; sisiltiaa@gmail.com³; andiniput1806@gmail.com⁴; viomartine95@gmail.com⁵

Article Info

Article history:

Received 27/10/2025

Revised 27/10/2025

Accepted 29/10/2025

Abstract

The development of accounting standards in Indonesia has significant implications for all entities, including non-profit organizations. One of the key regulations is ISAK 35, which requires non-profit entities to present their financial statements in a more transparent, accountable, and standardized manner in accordance with financial accounting principles. However, in practice, many religious foundations have not yet been able to fully implement ISAK 35, due to limited human resources, lack of technical understanding, and restricted access to accounting training. This study aims to analyze the extent to which accounting training contributes to improving the understanding and implementation of ISAK 35 in religious foundations in Indonesia. Using secondary data derived from foundation financial statements and accounting training documentation, this research seeks to provide a real picture of the strategic role of training in supporting financial governance aligned with accounting standards. The analysis shows that accounting training has a significant impact on foundation managers' understanding of asset classification, liabilities, and revenue recognition in accordance with ISAK 35. Foundations that participated in training programs tend to have more structured and consistent financial reports and are better able to meet transparency requirements for donors and regulators. This study provides practical implications for accounting training providers, professional associations, and regulators that targeted, needs-based, and continuous training can strengthen the implementation of ISAK 35 in the non-profit sector.

Keywords: ISAK 35, non-profit organization, religious foundation, accounting training, financial statements.

Abstrak

Perkembangan standar akuntansi di Indonesia membawa konsekuensi bagi seluruh entitas, termasuk organisasi nirlaba. Salah satu regulasi penting adalah ISAK 35 yang mewajibkan entitas nirlaba untuk menyajikan laporan keuangan secara lebih transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip akuntansi keuangan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak yayasan keagamaan belum sepenuhnya mampu menerapkan ISAK 35, baik karena keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pemahaman teknis, maupun terbatasnya akses terhadap pelatihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pelatihan akuntansi berperan dalam meningkatkan pemahaman dan penerapan ISAK 35 pada yayasan keagamaan di Indonesia. Dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan yayasan dan dokumentasi program pelatihan akuntansi, penelitian ini berupaya memberikan gambaran nyata mengenai peran strategis pelatihan dalam menunjang tata kelola keuangan yang sesuai standar. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelatihan akuntansi mampu memberikan dampak signifikan terhadap pemahaman pengurus yayasan mengenai klasifikasi aset, kewajiban, dan pengakuan pendapatan sesuai dengan ISAK 35. Yayasan yang mengikuti program pelatihan cenderung memiliki laporan keuangan yang lebih terstruktur, konsisten, serta mampu memenuhi kebutuhan transparansi bagi para donatur maupun regulator. Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi lembaga penyelenggara pelatihan akuntansi, asosiasi profesi, serta regulator, bahwa pelatihan yang terarah, berbasis kebutuhan, dan berkesinambungan dapat memperkuat penerapan ISAK 35 di sektor nirlaba.

Kata Kunci: ISAK 35, organisasi nirlaba, yayasan keagamaan, pelatihan akuntansi, laporan keuangan.



PENDAHULUAN

Organisasi nirlaba di Indonesia, khususnya yayasan keagamaan, memegang peranan penting dalam kehidupan sosial, pendidikan, dan spiritual masyarakat. Sebagai lembaga yang mengelola dana publik dari sumbangan umat, hibah, maupun bantuan pemerintah, yayasan dituntut untuk memiliki tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai standar akuntansi. Kebutuhan ini semakin mendesak sejak diterbitkannya Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yang mewajibkan organisasi nirlaba menyusun laporan keuangan dengan struktur yang menyerupai entitas berorientasi laba namun tetap menyesuaikan karakteristik non-laba. ISAK 35 mengatur secara jelas mengenai penyajian laporan keuangan, termasuk laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Sayangnya, implementasi ISAK 35 di yayasan keagamaan masih menghadapi banyak kendala.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hambatan utama terletak pada kapasitas sumber daya manusia yang mengelola keuangan. Sebagian besar pengurus yayasan bukanlah akuntan profesional, melainkan rohaniawan atau relawan yang memiliki keterbatasan dalam pengetahuan teknis akuntansi. Hal ini mengakibatkan laporan keuangan yayasan seringkali hanya berupa catatan kas masuk dan keluar tanpa klasifikasi yang sesuai standar. Minimnya pemahaman tentang prinsip akrual, pencatatan aset tetap, atau pengakuan pendapatan menambah kompleksitas masalah. Oleh karena itu, pelatihan akuntansi muncul sebagai solusi strategis untuk meningkatkan kapasitas pengurus yayasan dalam menerapkan ISAK 35.

Pelatihan akuntansi dipandang bukan sekadar transfer pengetahuan, melainkan juga media pembentukan budaya akuntabilitas. Melalui pelatihan, pengurus yayasan dapat memahami konsep dasar akuntansi, menguasai format laporan sesuai ISAK 35, hingga mampu mengoperasikan perangkat lunak akuntansi sederhana. Dengan meningkatnya kompetensi akuntansi, diharapkan yayasan keagamaan dapat menyusun laporan keuangan yang lebih informatif, dapat diaudit, serta meningkatkan kepercayaan publik. Namun demikian, efektivitas pelatihan akuntansi perlu dibuktikan secara empiris, terutama dengan melihat hasil nyata dalam bentuk laporan keuangan yayasan yang telah mengikuti program pelatihan.

Penelitian ini berfokus pada analisis peran pelatihan akuntansi terhadap penerapan ISAK 35 pada yayasan keagamaan di Indonesia dengan memanfaatkan data sekunder. Data yang digunakan meliputi laporan keuangan yayasan sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan, dokumen pelatihan, serta laporan evaluasi internal. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran menyeluruh mengenai seberapa besar pelatihan berkontribusi terhadap kualitas laporan keuangan yayasan. Selain itu, penelitian ini juga ingin menegaskan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan merupakan faktor kunci keberhasilan implementasi ISAK 35 di sektor nirlaba.

Konsep Organisasi Nirlaba : Organisasi nirlaba adalah entitas yang didirikan dengan tujuan utama untuk memberikan manfaat sosial, pendidikan, kesehatan, budaya, maupun keagamaan tanpa berorientasi pada perolehan laba. Meskipun tidak mengejar keuntungan finansial, organisasi ini tetap memerlukan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang akuntabel. Menurut Salamon (2019), organisasi nirlaba memiliki karakteristik utama berupa: (1) tujuan sosial, bukan komersial; (2) sumber dana yang sebagian besar berasal dari donasi, hibah, atau kontribusi sukarela; (3) adanya akuntabilitas kepada publik dan donatur.

Dalam konteks Indonesia, yayasan merupakan salah satu bentuk organisasi nirlaba yang banyak bergerak di bidang pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (jo. UU No. 28 Tahun 2004), yayasan wajib menyampaikan laporan tahunan, termasuk laporan keuangan, kepada pembina yayasan sebagai bentuk pertanggung jawaban. Namun, regulasi tersebut belum secara rinci mengatur format penyajian laporan keuangan, sehingga diperlukan standar akuntansi yang lebih spesifik.

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Nirlaba : Sebelum adanya ISAK 35, penyajian laporan keuangan organisasi nirlaba di Indonesia mengacu pada PSAK 45: Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Namun, PSAK 45 dipandang masih menyisakan banyak kelemahan, terutama terkait dengan konsistensi penyajian dan pemahaman praktis di lapangan. Oleh karena itu, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2020.

ISAK 35 mengadopsi pendekatan akuntansi berbasis akrual yang lebih komprehensif, dengan fokus pada : Penyajian Aset Bersih → diklasifikasikan menjadi (a) aset bersih dengan pembatasan dari pemberi sumber daya, dan (b) aset bersih tanpa pembatasan. Pengakuan Pendapatan → sumbangan, hibah, atau kontribusi anggota harus diungkapkan sesuai dengan sumber dan pembatasannya. Pengungkapan Informasi Tambahan → mencakup catatan atas laporan keuangan yang lebih rinci untuk meningkatkan transparansi.

Dengan demikian, ISAK 35 bertujuan untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih relevan, andal, dan dapat dipahami oleh pemangku kepentingan. Teori Akuntabilitas dalam Organisasi Nirlaba : Menurut teori akuntabilitas, setiap entitas, baik profit maupun non-profit, memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya yang diterima. Ebrahim (2003) menyatakan bahwa akuntabilitas organisasi nirlaba meliputi akuntabilitas keuangan, akuntabilitas kinerja, dan akuntabilitas misi sosial. Dalam konteks yayasan pendidikan, akuntabilitas keuangan menjadi isu krusial karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana pendidikan, beasiswa, maupun donasi. Dengan adanya ISAK 35, diharapkan yayasan dapat menyajikan laporan keuangan yang tidak hanya memenuhi persyaratan legal, tetapi juga mencerminkan integritas dan transparansi.

Penelitian terdahulu beberapa penelitian mengenai implementasi standar akuntansi nirlaba di Indonesia memberikan gambaran yang relevan dengan penelitian ini : Nurhayati (2023) menemukan bahwa penerapan ISAK 35 pada yayasan sosial meningkatkan kepercayaan publik, terutama melalui pengungkapan lebih rinci terkait sumber dana dan penggunaannya. Wahyudi (2022) menyoroti bahwa kendala utama implementasi ISAK 35 adalah keterbatasan sumber daya manusia dengan latar belakang akuntansi, terutama di yayasan kecil. Haryanto & Lestari (2021) menunjukkan bahwa yayasan pendidikan yang menerapkan ISAK 35 mampu menyusun laporan keuangan yang lebih informatif dibandingkan dengan yayasan yang masih menggunakan laporan kas sederhana. Siregar (2020) menemukan bahwa adopsi ISAK 35 berpengaruh positif terhadap peluang yayasan untuk memperoleh pendanaan dari lembaga donor internasional. Pratiwi (2021) menegaskan bahwa penerapan standar akuntansi nirlaba memerlukan pelatihan dan sosialisasi intensif agar dapat dipahami oleh pengurus yayasan yang berlatar belakang non-akuntansi.

Dari penelitian-penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi ISAK 35 berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas yayasan, namun keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh kapasitas internal masing-masing yayasan. Kesenjangan Penelitian : Meskipun telah banyak penelitian mengenai ISAK 35, sebagian besar masih berfokus pada aspek konseptual dan normatif. Studi kasus empiris pada yayasan pendidikan di Indonesia masih relatif terbatas. Padahal, sektor pendidikan merupakan salah satu sektor nirlaba yang mengelola dana besar dari masyarakat maupun pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menelaah bagaimana implementasi ISAK 35 dalam laporan keuangan yayasan pendidikan, serta menganalisis tantangan dan peluang yang dihadapi.

Perkembangan dunia akuntansi di Indonesia tidak hanya berfokus pada entitas bisnis yang berorientasi laba, tetapi juga pada entitas yang memiliki tujuan sosial, keagamaan, pendidikan, dan kemanusiaan. Entitas seperti yayasan, lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan tempat ibadah merupakan contoh organisasi yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena sifatnya yang nonkomersial, entitas tersebut tidak berorientasi pada laba, melainkan pada pelayanan kepada publik. Oleh karena itu, penyajian laporan keuangan organisasi nirlaba membutuhkan standar yang mampu menggambarkan aktivitas sosial dan tanggung jawab publik secara transparan serta akuntabel.

Sebelum diterbitkannya Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35, pedoman penyusunan laporan keuangan untuk entitas nirlaba diatur dalam PSAK 45 (Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba). Namun, perkembangan kebutuhan akuntansi di Indonesia mendorong perlunya interpretasi yang lebih terarah agar entitas nirlaba memiliki panduan jelas dalam menerapkan standar pelaporan. ISAK 35 hadir sebagai pedoman teknis untuk memastikan laporan keuangan nirlaba disusun dengan prinsip relevansi, keandalan, keterbandingan, dan dapat dipahami.

Penerapan ISAK 35 menjadi krusial karena menekankan bahwa entitas nirlaba tetap harus mempertanggungjawabkan sumber daya yang dikelola kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Dalam praktiknya, entitas nirlaba menerima berbagai sumber dana seperti sumbangan, hibah, dan bantuan pemerintah yang menuntut transparansi dalam pengelolaan keuangan. Dengan adanya ISAK 35, penyajian laporan keuangan diharapkan tidak hanya memenuhi kepatuhan formal, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga sosial tersebut. Namun, penerapan ISAK 35 di

lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Banyak yayasan dan lembaga sosial yang belum memiliki sumber daya manusia dengan kompetensi akuntansi yang memadai. Selain itu, pemahaman mengenai komponen laporan keuangan sesuai ISAK 35—seperti laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan—belum diterapkan secara konsisten. Akibatnya, laporan keuangan yang dihasilkan sering kali tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penerapan ISAK 35 telah diimplementasikan oleh organisasi nirlaba di Indonesia, serta menganalisis hambatan dan faktor pendukungnya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi literatur akuntansi sektor nirlaba dan manfaat praktis bagi lembaga sosial dalam meningkatkan akuntabilitas keuangannya.

Perkembangan standar akuntansi di Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan arah yang semakin konvergen dengan International Financial Reporting Standards (IFRS). Salah satu hasil dari perkembangan tersebut adalah diterbitkannya Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nirlaba. ISAK 35 diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK IAI) sebagai respons atas kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor nirlaba, yang selama ini sering kali dianggap kurang memiliki pedoman pelaporan yang seragam.

Organisasi nirlaba, termasuk yayasan keagamaan, memiliki karakteristik yang berbeda dengan entitas bisnis. Tujuan utama organisasi nirlaba bukanlah mencari keuntungan, melainkan memberikan manfaat sosial, pendidikan, keagamaan, atau kemanusiaan. Oleh karena itu, laporan keuangan organisasi semacam ini berfungsi bukan hanya sebagai alat pertanggungjawaban keuangan, tetapi juga sebagai bentuk transparansi kepada publik, donatur, dan lembaga pengawas. Dalam konteks inilah ISAK 35 menjadi penting, karena menyediakan pedoman yang komprehensif mengenai cara penyajian laporan aktivitas, laporan posisi keuangan, arus kas, serta catatan atas laporan keuangan untuk entitas nirlaba.

Meskipun telah diberlakukan sejak 1 Januari 2020, penerapan ISAK 35 masih menghadapi banyak kendala di lapangan, khususnya di lingkungan yayasan keagamaan. Berdasarkan pengamatan awal dan sejumlah penelitian sebelumnya (Purba & Manullang, 2023; Siahaan & Purba, 2024), banyak yayasan belum memahami secara penuh bagaimana menerapkan prinsip-prinsip ISAK 35. Permasalahan utama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia di bidang akuntansi, kurangnya literasi keuangan, serta minimnya pelatihan teknis yang disesuaikan dengan kebutuhan yayasan.

Dalam praktiknya, banyak yayasan masih menyusun laporan keuangan secara sederhana tanpa memisahkan dana terikat dan tidak terikat, atau tidak mengungkapkan informasi aktivitas secara lengkap. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara praktik di lapangan dan standar yang ditetapkan oleh ISAK 35. Padahal, laporan keuangan yang tidak sesuai standar dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik serta menghambat akses yayasan terhadap sumber pendanaan eksternal.

Sejalan dengan kondisi tersebut, pelatihan akuntansi menjadi faktor strategis dalam mendorong pemahaman dan implementasi ISAK 35. Pelatihan berfungsi tidak hanya sebagai sarana transfer pengetahuan teknis, tetapi juga sebagai media pembentukan kesadaran akuntabilitas dan etika pelaporan. Yayasan yang mendapatkan pembinaan dan pelatihan cenderung memiliki tata kelola keuangan yang lebih tertib, transparan, dan sesuai dengan prinsip akuntansi nirlaba.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pelatihan akuntansi berperan dalam meningkatkan pemahaman dan penerapan ISAK 35 pada yayasan keagamaan di Indonesia. Dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan yayasan, dokumen pelatihan, serta literatur akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi penguatan tata kelola organisasi nirlaba di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi regulator, asosiasi profesi, serta lembaga penyelenggara pelatihan untuk mengembangkan program peningkatan kapasitas yang lebih efektif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder sebagai sumber utama. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin memahami fenomena implementasi ISAK 35 dalam konteks yayasan keagamaan, serta menilai kontribusi pelatihan akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian bukan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk memahami fenomena penerapan standar

akuntansi dari sudut pandang praktik nyata di lapangan. Pendekatan kualitatif juga memungkinkan peneliti menelaah konteks sosial dan organisasi dari penerapan ISAK 35, termasuk pemahaman pengelola yayasan terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kesesuaian laporan keuangan dengan standar yang berlaku.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas : Laporan keuangan yayasan keagamaan sebelum dan sesudah pelatihan akuntansi. Dokumen ini menjadi dasar untuk menilai perubahan dalam penyajian laporan keuangan sesuai ISAK 35. Dokumentasi pelatihan akuntansi, termasuk materi pelatihan, modul, jadwal kegiatan, dan laporan evaluasi dari penyelenggaraan. Hasil publikasi atau laporan internal yayasan terkait kegiatan pengelolaan keuangan pasca pelatihan. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen dan publikasi resmi yang telah tersedia. Jenis data meliputi: (a) Laporan keuangan yayasan atau lembaga sosial yang telah atau belum menerapkan ISAK 35. (b) Dokumen kebijakan akuntansi internal lembaga nirlaba. (c) Laporan audit independen (jika tersedia).

Jurnal ilmiah, artikel akademik, buku teks, dan pedoman PSAK/ISAK yang relevan. Sumber data diperoleh dari: (a) Situs resmi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang mempublikasikan ISAK 35. (b) Portal jurnal ilmiah nasional seperti Garuda Ristekdikti, Google Scholar, dan Neliti. (c) Dokumen keuangan dan laporan tahunan beberapa yayasan sosial yang dipublikasikan secara daring.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama : (a) Studi Dokumentasi, yaitu dengan menelaah laporan keuangan, pedoman akuntansi, dan publikasi organisasi nirlaba yang berkaitan dengan penerapan ISAK 35. (b) Studi Literatur, dengan membaca dan menelaah berbagai penelitian terdahulu, jurnal, buku, serta artikel yang relevan dengan tema akuntansi organisasi nirlaba dan penerapan ISAK 35. (c) Analisis Komparatif, untuk membandingkan laporan keuangan sebelum dan sesudah penerapan ISAK 35 (jika data tersedia), guna melihat perubahan dalam penyajian informasi keuangan.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Peneliti mengakses laporan keuangan yayasan yang tersedia secara publik maupun yang diperoleh dari laporan evaluasi internal organisasi. Selain itu, materi dan laporan pelatihan diperoleh dari lembaga penyelenggara atau asosiasi profesi yang bekerja sama dengan yayasan. Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah berikut : Analisis komparatif antara laporan keuangan yayasan sebelum dan sesudah pelatihan untuk menilai kesesuaian dengan ISAK 35. *Content analysis* terhadap dokumen pelatihan guna mengetahui kesesuaian materi dengan kebutuhan yayasan keagamaan. Interpretasi kualitatif untuk menarik kesimpulan mengenai peran pelatihan akuntansi terhadap implementasi ISAK 35. Untuk menjaga validitas, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber.

Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut: (a) Reduksi Data (*Data Reduction*):

Menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan, seperti komponen laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, serta kebijakan akuntansi yang digunakan. (b) Penyajian Data (*Data Display*):

Data disajikan dalam bentuk tabel perbandingan, deskripsi naratif, dan kutipan dari laporan keuangan yang menunjukkan implementasi ISAK 35. (c) Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*):

Hasil analisis dibandingkan dengan teori dan literatur terkait untuk menarik kesimpulan mengenai tingkat penerapan ISAK 35 di yayasan yang diteliti, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi.

Lokasi dan Objek Penelitian adalah yayasan sosial dan lembaga keagamaan di Indonesia yang berstatus badan hukum dan terdaftar di Kemenkumham, dengan fokus pada organisasi yang memiliki laporan keuangan tahunan. Beberapa contoh lembaga yang dijadikan rujukan data sekunder antara lain: (a) Yayasan Santha Yana (Denpasar). (b) Yayasan Happy Hearts Indonesia (Yogyakarta). (c) Gereja HKBP Tigabolon (Sumatera Utara). (d) Yayasan Jember Berbagai Berkah Bersama (Jawa Timur)

Data laporan keuangan dibandingkan dengan dokumentasi pelatihan serta laporan evaluasi internal, sehingga hasil analisis lebih reliabel. Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder, sehingga tidak mencakup persepsi langsung pengurus yayasan yang mengikuti pelatihan. Dengan demikian, hasil penelitian lebih menekankan pada hasil nyata dari laporan keuangan dibanding aspek psikologis atau motivasi individu.

Keterbatasan Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain: (a) Tidak dilakukan wawancara langsung dengan pengelola yayasan karena keterbatasan waktu dan akses. (b) Data keuangan yang digunakan bersumber dari laporan publik, sehingga tidak mencakup informasi internal yang lebih detail. (c) Penerapan ISAK 35 masih relatif baru, sehingga literatur ilmiah dan praktik implementasi di lapangan masih terbatas.

Meskipun demikian, penelitian ini tetap memberikan gambaran representatif tentang bagaimana organisasi nirlaba di Indonesia mulai menyesuaikan diri dengan standar pelaporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yayasan yang telah mengikuti pelatihan akuntansi memiliki kemampuan lebih baik dalam menyusun laporan keuangan sesuai ISAK 35. Laporan keuangan yayasan pasca pelatihan lebih transparan, mudah dipahami, serta memenuhi unsur akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan temuan Nurhayati & Putra (2020) yang menyatakan standar akuntansi berbanding lurus dengan kualitas laporan keuangan nirlaba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penerapan ISAK 35 pada organisasi nirlaba di Indonesia berbeda-beda tergantung pada kapasitas dan karakteristik lembaga. Lembaga besar yang memiliki auditor internal atau staf akuntansi profesional, seperti yayasan pendidikan dan lembaga sosial berskala nasional, umumnya telah menerapkan ISAK 35 dengan baik. Mereka mampu menyusun laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan sesuai pedoman interpretasi standar.

Sebaliknya, lembaga kecil dan menengah, khususnya di daerah, masih kesulitan dalam mengimplementasikan seluruh komponen ISAK 35. Banyak dari mereka hanya menyusun laporan sederhana berupa catatan penerimaan dan pengeluaran kas, tanpa klasifikasi aset neto atau pengungkapan informasi yang memadai. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penerapan standar yang cukup lebar antara organisasi yang memiliki akses terhadap sumber daya profesional dan yang tidak. Dari analisis lebih dalam, penerapan ISAK 35 memiliki dampak positif terhadap transparansi dan reputasi lembaga nirlaba.

Yayasan yang menerapkan standar ini melaporkan peningkatan kepercayaan dari para donatur, pengelola dana CSR, serta masyarakat umum. Dengan laporan keuangan yang terstandar, lembaga lebih mudah memperoleh dana hibah atau kerja sama program dari pihak ketiga. Selain itu, hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan ISAK 35 mendorong lembaga untuk bertransformasi menuju tata kelola yang lebih profesional. Pengelolaan dana menjadi lebih terkontrol, aset dapat dilacak dengan lebih baik, dan tanggung jawab sosial lembaga dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Ini memperlihatkan bahwa ISAK 35 bukan hanya instrumen teknis, melainkan juga alat strategis dalam mewujudkan good governance di sektor nirlaba.

Selain itu, yayasan yang belum menerapkan ISAK 35 cenderung masih menggunakan format laporan sederhana yang tidak memenuhi prinsip transparansi. Kondisi ini memperkuat hasil penelitian Suhartono (2021) yang mengidentifikasi rendahnya kompetensi SDM sebagai kendala utama penerapan standar akuntansi. Penelitian ini juga menemukan bahwa dengan adanya pelatihan akuntansi, yayasan mampu mengatasi sebagian besar kendala tersebut, sebagaimana didukung oleh hasil riset Sari & Utami (2019).

Secara umum, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kombinasi antara penerapan ISAK 35 dan pelatihan akuntansi dapat meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas laporan keuangan yayasan. Hal ini konsisten dengan pandangan Mardiasmo (2018) yang menekankan pentingnya standar akuntansi sebagai instrumen untuk mewujudkan tata kelola yang baik di sektor nirlaba.

Gambaran Umum Yayasan Keagamaan di Indonesia : Yayasan keagamaan merupakan salah satu bentuk organisasi nirlaba yang berperan dalam bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan. Sebagai entitas nirlaba, tujuan utama yayasan bukan mencari keuntungan, melainkan memberikan manfaat sosial kepada masyarakat. Meski demikian, pengelolaan keuangan tetap menjadi aspek penting karena berkaitan dengan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Dalam praktiknya, banyak yayasan keagamaan menerima dana dari donasi masyarakat, hibah lembaga dalam dan luar negeri, serta kontribusi anggota. Kompleksitas pengelolaan dana ini menuntut adanya laporan keuangan yang transparan dan sesuai standar, sehingga penerapan ISAK 35 menjadi relevan. Berdasarkan laporan tahunan dan publikasi resmi, sebagian besar yayasan di Indonesia masih berada pada tahap awal penerapan ISAK 35. Meskipun mereka telah menyusun laporan keuangan secara rutin, penyajian dan klasifikasi akun masih sering mengacu pada praktik bisnis konvensional atau PSAK 1, bukan pada format dan pengungkapan yang diatur dalam ISAK 35.

Kondisi Penerapan ISAK 35 Sebelum Pelatihan Akuntansi : Berdasarkan literatur dan temuan dari berbagai penelitian sebelumnya, masih banyak yayasan keagamaan yang belum sepenuhnya menerapkan ISAK 35. Beberapa masalah yang sering muncul antara lain : (a) Ketidakjelasan klasifikasi aset neto, di mana dana terikat dan tidak terikat belum dipisahkan secara konsisten. (b) Laporan aktivitas

belum sesuai standar, misalnya masih menggunakan format laporan laba rugi layaknya perusahaan komersial. (c) Keterbatasan catatan atas laporan keuangan, yang seharusnya memuat informasi mendetail mengenai kebijakan akuntansi dan rincian pos-pos laporan. (d) SDM yang terbatas, karena sebagian besar pengurus yayasan berlatar belakang pendidikan non-akuntansi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan ISAK 35 dengan praktik di lapangan, sehingga pelatihan akuntansi menjadi krusial.

Dampak Pelatihan Akuntansi terhadap Penerapan ISAK 35 : Pelatihan akuntansi memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pemahaman dan keterampilan pengurus yayasan. Hasil dari literatur menunjukkan bahwa yayasan yang telah mengikuti pelatihan cenderung : (a) Mampu menyajikan laporan posisi keuangan sesuai standar. Aset neto terikat dan tidak terikat mulai dipisahkan, sehingga memberikan gambaran yang lebih transparan mengenai penggunaan dana. (b) Laporan aktivitas lebih akuntabel, di mana sumber dan penggunaan dana tercatat dengan jelas. Hal ini meningkatkan kepercayaan para donatur. (c) Penyusunan laporan arus kas lebih sistematis, dengan memisahkan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. (d) Meningkatkan keterampilan dokumentasi dan penyusunan catatan keuangan, yang menjadi bagian penting dari laporan keuangan ISAK 35. Dengan demikian, pelatihan tidak hanya menambah pengetahuan teoretis, tetapi juga mengubah praktik akuntansi sehari-hari di yayasan.

Perbandingan Yayasan yang Sudah dan Belum Mengikuti Pelatihan : Secara umum, perbedaan antara yayasan yang sudah mengikuti pelatihan akuntansi dengan yang belum dapat dilihat dari: (a) Kualitas laporan keuangan: Yayasan terlatih mampu menghasilkan laporan sesuai ISAK 35, sedangkan yang belum masih menggunakan sistem sederhana atau manual. (b) Transparansi keuangan: Yayasan terlatih cenderung lebih terbuka kepada publik, sementara yayasan yang belum terlatih sering kali hanya menyajikan laporan kas masuk dan keluar. (c) Kepercayaan publik: Donatur lebih percaya pada yayasan yang laporan keuangannya sesuai standar, sehingga potensi penghimpunan dana juga lebih besar. (d) Perbandingan ini menunjukkan urgensi pelatihan sebagai sarana untuk meningkatkan standar akuntansi di yayasan keagamaan.

Kendala dalam Penerapan ISAK 35 : Meski pelatihan sudah dilakukan, masih terdapat beberapa kendala, antara lain: (a) Keterbatasan biaya → Yayasan kecil sulit mengalokasikan anggaran untuk pelatihan berkelanjutan. (b) Resistensi terhadap perubahan → Sebagian pengurus merasa sistem lama sudah cukup, sehingga enggan beradaptasi. (c) Kurangnya dukungan teknologi → Banyak yayasan belum menggunakan software akuntansi yang sesuai, sehingga proses pencatatan masih manual.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pelatihan akuntansi terhadap penerapan ISAK 35 pada yayasan keagamaan di Indonesia. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pelatihan akuntansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kualitas penyajian laporan keuangan. Yayasan yang mengikuti program pelatihan lebih mampu menyusun laporan sesuai dengan ketentuan ISAK 35, baik dari aspek klasifikasi aset neto, penyusunan laporan aktivitas, penyajian laporan arus kas, maupun kelengkapan catatan atas laporan keuangan. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan merupakan faktor kunci yang mempercepat implementasi standar akuntansi di lingkungan organisasi nirlaba keagamaan.

Meskipun hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ISAK 35 membawa dampak positif terhadap akuntabilitas dan transparansi lembaga nirlaba, kenyataannya implementasi di lapangan masih belum merata. Banyak lembaga yang menganggap bahwa standar ini terlalu “berat” dan lebih cocok untuk entitas besar dengan sistem administrasi keuangan yang kompleks. Beberapa lembaga kecil mengeluhkan keterbatasan kemampuan untuk menyesuaikan laporan mereka dengan komponen ISAK 35 yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sebagian besar lembaga hanya berfokus pada laporan kas masuk dan keluar, karena dianggap paling mudah dipahami oleh pengurus yang bukan berlatar belakang akuntansi.

Hal ini memperlihatkan bahwa tantangan implementasi ISAK 35 bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah persepsi dan budaya organisasi. Banyak yayasan atau lembaga sosial masih memandang pelaporan keuangan sebagai kegiatan administratif semata, bukan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kepada publik. Padahal, menurut teori *stakeholder*, organisasi nirlaba memiliki tanggung jawab yang lebih besar karena dana yang dikelolanya bersumber dari publik, donatur, maupun lembaga pemerintah. Kritik lain yang muncul adalah belum adanya model pelaporan sederhana berbasis ISAK 35 yang dapat digunakan oleh lembaga nirlaba kecil. Sehingga, upaya adaptasi standar ini seharusnya diiringi dengan pembuatan template laporan keuangan yang lebih aplikatif tanpa menghilangkan substansi transparansi dan akuntabilitas.

Dampak Pelatihan terhadap Implementasi ISAK 35 : Pelatihan akuntansi berperan sebagai sarana transfer pengetahuan teknis, pembentukan keterampilan praktis, sekaligus pembangunan budaya akuntabilitas di dalam organisasi. Pertama, dari aspek pengetahuan, pelatihan memungkinkan pengurus yayasan memahami konsep dasar yang sebelumnya jarang dipahami, seperti pengakuan pendapatan berbasis akrual, klasifikasi aset neto terikat dan tidak terikat, serta perlakuan akuntansi atas sumbangan bersyarat. Kedua, dari sisi keterampilan, pelatihan mendorong penerapan langsung melalui praktik penyusunan jurnal, pengisian format laporan keuangan, serta penggunaan *template* berbasis ISAK 35. Ketiga, dari aspek budaya, pelatihan yang dilakukan secara konsisten menumbuhkan kebiasaan dokumentasi, pemeriksaan internal, dan transparansi sehingga laporan keuangan yayasan tidak hanya sesuai standar, tetapi juga lebih mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan.

Implementasi pada Unsur-unsur ISAK 35 : Dampak pelatihan dapat dilihat lebih detail melalui analisis pada setiap komponen utama laporan keuangan sesuai ISAK 35: (a)Klasifikasi Aset Neto. Sebelum mengikuti pelatihan, banyak yayasan mencatat penerimaan dana secara sederhana sebagai kas masuk tanpa membedakan sifat terikat atau tidak terikatnya. Setelah pelatihan, pengurus mulai memahami perlunya pemisahan aset neto. Misalnya, donasi yang ditujukan untuk pembangunan gedung dicatat sebagai aset neto terikat hingga tujuan tercapai, sementara donasi umum dicatat sebagai aset neto tidak terikat. Perubahan ini berdampak pada transparansi dan memungkinkan donor menilai kesesuaian penggunaan dana. (b)Laporan Aktivitas. Yayasan yang telah mengikuti pelatihan beralih dari pencatatan berbasis kas sederhana menuju laporan aktivitas berbasis akrual. Perubahan ini membantu menampilkan pendapatan dan beban sesuai periode terjadinya, bukan sekadar arus kas yang diterima. Laporan aktivitas menjadi alat ukur yang lebih akurat terhadap kinerja operasional yayasan dalam satu periode tertentu. (c)Laporan Arus Kas. Pelatihan juga mengajarkan pemisahan arus kas ke dalam tiga kategori, yaitu operasional, investasi, dan pendanaan. Dengan adanya pemisahan ini, pengurus dan donor dapat lebih mudah menganalisis likuiditas yayasan, serta memahami sumber utama pembiayaan program dan investasi jangka panjang yang dilakukan. (d)Catatan atas Laporan Keuangan. Sebelum adanya pelatihan, catatan atas laporan keuangan seringkali diabaikan atau disajikan secara minimalis. Setelah pelatihan, pengurus mulai menambahkan informasi lebih rinci, seperti kebijakan akuntansi yang digunakan, rincian aset tetap, serta penjelasan mengenai sumbangan bersyarat. Kelengkapan catatan ini meningkatkan transparansi, memudahkan proses audit, dan memperkuat kepercayaan publik.

Penelitian ini juga memberikan gambaran tentang praktik yang dapat langsung diterapkan oleh yayasan keagamaan. Salah satunya adalah pemahaman terkait pencatatan donasi. Donasi umum tanpa syarat diakui sebagai aset neto tidak terikat, sementara donasi yang memiliki tujuan khusus, misalnya pembangunan gedung atau pembelian aset tertentu, dicatat sebagai aset neto terikat. Adapun donasi bersyarat harus diakui terlebih dahulu sebagai liabilitas, dan baru diakui sebagai pendapatan apabila syarat terpenuhi. Praktik pencatatan sederhana ini membantu yayasan dalam menyusun laporan yang lebih akurat.

Selain itu, pelatihan yang efektif perlu disusun dalam kurikulum terstruktur. Model kurikulum yang direkomendasikan terdiri atas delapan modul utama, antara lain pengenalan ISAK 35, prinsip akuntansi berbasis akrual, klasifikasi aset neto, pengakuan pendapatan, pencatatan aset tetap, penyusunan laporan aktivitas dan arus kas, penyusunan catatan atas laporan, serta penggunaan perangkat lunak akuntansi sederhana. Metode pelatihan yang direkomendasikan adalah *blended learning*, yaitu kombinasi tatap muka intensif, modul daring, serta pendampingan atau mentoring pasca-pelatihan. Dengan pendekatan ini, peserta pelatihan tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga didampingi dalam penerapan nyata pada laporan keuangan yayasan.

Analisis Kritis terhadap Temuan : Hasil penelitian mengindikasikan bahwa meskipun ISAK 35 telah memberikan kerangka pelaporan yang lebih jelas, tingkat implementasi di lapangan masih jauh dari optimal. Dalam konteks teori *institutional isomorphism*, hal ini dapat dijelaskan karena lembaga nirlaba cenderung meniru praktik entitas sejenis yang dianggap sukses. Namun, tanpa adanya tekanan normatif atau regulatif yang kuat, adopsi standar tidak akan merata. Selain itu, berdasarkan analisis literatur, beberapa lembaga nirlaba yang menerima pendanaan luar negeri cenderung lebih cepat mengadopsi ISAK 35 karena ada tuntutan akuntabilitas eksternal yang tinggi. Sebaliknya, lembaga lokal dengan skala kecil lebih fokus pada aktivitas sosial daripada kepatuhan terhadap standar akuntansi formal. Oleh karena itu, diperlukan strategi nasional dalam bentuk pelatihan dan sistem pelaporan digital sederhana untuk membantu lembaga nirlaba memahami dan menerapkan ISAK 35 secara efektif.

Evaluasi Keberhasilan Pelatihan : Keberhasilan pelatihan dapat diukur melalui beberapa indikator. Pertama, adanya peningkatan jumlah item laporan keuangan yang sesuai dengan checklist

ISAK 35. Kedua, peningkatan skor pengetahuan peserta yang diukur melalui *pre-test* dan *post-test*. Ketiga, menurunnya temuan audit eksternal terkait klasifikasi aset neto atau pengakuan pendapatan. Keempat, ketepatan waktu penerbitan laporan tahunan yayasan. Selain itu, dalam jangka menengah, peningkatan kepatuhan terhadap ISAK 35 juga berpotensi meningkatkan kepercayaan donor yang tercermin dari peningkatan dana yang diterima.

Kendala Implementasi dan Solusi : Meski pelatihan terbukti efektif, penelitian juga menemukan adanya kendala implementasi. Salah satunya adalah keterbatasan biaya, mengingat sebagian besar yayasan memiliki anggaran terbatas untuk kegiatan pelatihan. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong kerjasama regional antar-yayasan, penyediaan subsidi dari asosiasi profesi, serta penggunaan modul daring dengan biaya lebih terjangkau. Kendala lain adalah resistensi terhadap perubahan, terutama pada yayasan yang telah lama menggunakan sistem pencatatan manual. Hal ini dapat diatasi dengan menunjuk *figur champion* internal yang mendorong perubahan, serta memberikan sesi singkat terkait manajemen perubahan. Kendala teknologi juga menjadi hambatan bagi yayasan yang belum memiliki perangkat memadai. Oleh karena itu, penggunaan template sederhana berbasis Excel dapat menjadi solusi awal sebelum beralih ke perangkat lunak akuntansi yang lebih kompleks.

Implikasi Teoritis : Penelitian ini memperkaya literatur akuntansi nirlaba di Indonesia dengan memberikan bukti empiris mengenai peran ISAK 35 dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Temuan ini mendukung teori akuntabilitas publik (Ebrahim, 2003) yang menyatakan bahwa organisasi nirlaba memerlukan sistem pelaporan yang mampu menunjukkan pertanggungjawaban penggunaan dana. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori akuntansi nirlaba dalam konteks negara berkembang.

Implikasi Kebijakan : Temuan penelitian ini memberikan implikasi kebijakan yang penting. Bagi yayasan, hasil penelitian menegaskan perlunya melakukan analisis kesenjangan (*gap analysis*) untuk menilai aspek mana saja dari ISAK 35 yang belum diterapkan, kemudian menyusun rencana implementasi secara bertahap. Bagi penyelenggara pelatihan, diperlukan pengembangan modul standar ISAK 35 yang sederhana dan aplikatif untuk yayasan skala kecil, serta penyediaan program sertifikasi dasar bagi pengurus yayasan. Adapun bagi regulator, baik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) maupun pemerintah, temuan ini menegaskan pentingnya sosialisasi dan dukungan kebijakan berupa subsidi pelatihan, penyediaan template laporan, serta checklist kepatuhan yang dapat digunakan oleh yayasan sebagai panduan praktis.

Implikasi Praktis : Bagi yayasan pendidikan, implementasi ISAK 35 memberikan panduan yang lebih jelas dalam menyusun laporan keuangan. Adopsi standar ini dapat meningkatkan profesionalisme, memperkuat reputasi, serta membuka peluang kerjasama dengan donor nasional maupun internasional. Namun, yayasan harus berinvestasi pada peningkatan kapasitas SDM di bidang akuntansi, baik melalui pelatihan maupun rekrutmen tenaga ahli.

Keterbatasan dan Arah Penelitian Selanjutnya : Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama karena menggunakan data sekunder yang bersifat deskriptif. Akibatnya, penelitian belum dapat menggali secara mendalam persepsi, motivasi, maupun kendala psikologis yang dihadapi pengurus yayasan dalam menerapkan ISAK 35. Penelitian lanjutan dapat menggunakan metode primer seperti wawancara mendalam dan observasi partisipatif untuk menggali aspek tersebut. Selain itu, penelitian longitudinal juga diperlukan untuk menilai keberlanjutan dampak pelatihan dalam jangka panjang, serta melakukan analisis biaya-manfaat (*cost-benefit analysis*) terhadap program pelatihan. Hasil penelitian ini menguatkan pandangan bahwa pelatihan akuntansi memainkan peran penting dalam peningkatan kapasitas organisasi nirlaba untuk menerapkan standar akuntansi dengan benar. Secara teoretis, pelatihan berfungsi sebagai mekanisme pembelajaran organisasi (*organizational learning*) yang mampu menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik akuntansi di lapangan. Dengan demikian, pelatihan akuntansi tidak hanya berorientasi pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga membentuk kesadaran akuntabilitas di kalangan pengurus yayasan.

Penerapan ISAK 35 memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai struktur laporan keuangan nirlaba, yang berbeda dari entitas bisnis. Oleh karena itu, yayasan yang tidak memperoleh pembinaan atau pelatihan cenderung mengalami kesalahan dalam klasifikasi pendapatan dan pengungkapan aset bersih. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi standar tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh faktor sumber daya manusia dan kualitas pendidikan akuntansi yang diterima oleh pelaksana di lapangan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan ISAK 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Non-laba pada lembaga nirlaba di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi pemahaman, sumber daya manusia, maupun sistem pencatatan keuangan. Sebagian besar organisasi nirlaba telah menyadari pentingnya penyajian laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, namun dalam praktiknya implementasi ISAK 35 belum sepenuhnya optimal. Hanya sebagian lembaga yang telah menyesuaikan laporan keuangannya dengan standar ini secara menyeluruh, sementara lembaga lainnya masih menggunakan format sederhana yang belum sesuai ketentuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang menghambat penerapan ISAK 35 adalah keterbatasan tenaga akuntansi profesional, kurangnya pelatihan dari lembaga resmi seperti IAI, dan persepsi bahwa standar tersebut terlalu kompleks untuk lembaga kecil. Di sisi lain, lembaga yang telah menerapkan ISAK 35 secara konsisten menunjukkan peningkatan signifikan dalam hal transparansi, kredibilitas, dan kepercayaan publik. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan ISAK 35 pada yayasan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui transparansi, akuntabilitas, serta keseragaman dalam penyajian. Hasil analisis menunjukkan bahwa yayasan yang mengikuti pelatihan akuntansi lebih mampu menyusun laporan sesuai standar dibandingkan dengan yayasan yang belum mendapatkan pelatihan. Dengan demikian, pelatihan akuntansi terbukti menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi ISAK 35.

Selain itu, temuan ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang menekankan peran kompetensi pengelola yayasan dalam penerapan standar akuntansi. Kendala utama yang dihadapi yayasan umumnya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan pemahaman teknis. Namun, melalui pelatihan yang berkelanjutan dan penerapan standar akuntansi secara konsisten, kendala tersebut dapat diatasi.

Secara keseluruhan, pelatihan akuntansi terbukti berperan penting dalam meningkatkan penerapan ISAK 35 pada yayasan keagamaan di Indonesia. Pelatihan tidak hanya memberikan pengetahuan teknis, tetapi juga membentuk keterampilan praktis dan menumbuhkan budaya akuntabilitas di dalam organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yayasan yang mengikuti pelatihan lebih mampu menyajikan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai standar, sehingga meningkatkan kepercayaan publik. Meski demikian, keberhasilan implementasi membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pendanaan, pemanfaatan teknologi, serta kebijakan regulator yang mendorong akses pelatihan yang lebih luas. Dengan demikian, pelatihan akuntansi dapat menjadi instrumen strategis dalam memperkuat tata kelola keuangan organisasi nirlaba keagamaan di Indonesia.

Dengan demikian, kombinasi antara penerapan ISAK 35 dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan akuntansi dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan kredibilitas, kepercayaan publik, serta keberlanjutan yayasan sebagai organisasi nirlaba. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan ISAK 35 memiliki peran strategis dalam memperkuat tata kelola dan akuntabilitas lembaga nirlaba di Indonesia. Standar ini tidak hanya memberikan pedoman teknis pelaporan, tetapi juga menjadi instrumen moral bagi lembaga sosial untuk menjaga amanah publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Upaya bersama antara pemerintah, akademisi, dan praktisi akuntansi sangat dibutuhkan agar implementasi ISAK 35 dapat berjalan secara menyeluruh dan berkelanjutan di seluruh lembaga nirlaba di Indonesia.

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diajukan antara lain : (1) Bagi Lembaga Nirlaba: Perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang akuntansi melalui pelatihan dan workshop mengenai ISAK 35. Menerapkan sistem pencatatan keuangan berbasis digital untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar. Melakukan evaluasi berkala terhadap laporan keuangan untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan ISAK 35. (2) Bagi Pemerintah dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI): Diperlukan kebijakan yang mendorong penerapan standar ISAK 35 secara nasional, terutama bagi lembaga sosial yang menerima dana publik. Menyelenggarakan program pelatihan dan pendampingan khusus bagi organisasi kecil dan menengah agar dapat memahami serta menerapkan standar dengan benar. Mengembangkan panduan sederhana atau aplikasi pelaporan keuangan berbasis web yang mudah digunakan bagi lembaga nirlaba di daerah. (3) Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya: Disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif agar dapat mengukur tingkat kepatuhan lembaga nirlaba terhadap ISAK 35 secara nasional.

Perlu dilakukan studi komparatif antara lembaga yang telah dan belum menerapkan ISAK 35 untuk menilai dampaknya terhadap transparansi dan keberlanjutan organisasi. Bagi Yayasan – disarankan untuk secara konsisten menerapkan ISAK 35 dalam penyusunan laporan keuangan agar dapat meningkatkan akuntabilitas dan memperkuat kepercayaan publik. (a) Bagi Pengelola – perlu mengikuti pelatihan akuntansi secara berkelanjutan agar pemahaman terhadap standar akuntansi semakin mendalam dan mampu diterapkan dengan baik. (b) Bagi Regulator (IAI/Pemerintah) – diharapkan memberikan sosialisasi dan panduan teknis yang lebih komprehensif terkait implementasi ISAK 35, khususnya bagi yayasan kecil dan menengah. (c) Bagi Peneliti Selanjutnya – dianjurkan untuk melakukan penelitian empiris dengan menggunakan data primer melalui wawancara dan observasi langsung pada yayasan agar diperoleh gambaran yang lebih detail terkait kendala implementasi ISAK 35.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusinya dalam penyusunan jurnal ilmiah ini. Terima kasih kepada Bapak Aryanto Nur, S.E., M.M., M.Ak., Ak., CPA. Selaku Dosen Pengampu yang telah memberikan arahan dan masukan berharga agar tulisan ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan sejawat dan semua narasumber yang telah membantu dengan berbagi data, informasi, serta waktu sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan lancar. Tidak lupa, terima kasih penulis sampaikan kepada keluarga dan sahabat atas doa, dukungan moral, dan motivasi yang tiada henti selama proses penulisan jurnal ini. Harapan Penulis, tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi dunia akademik dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta menjadi sumbangsih positif bagi pembaca dan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Akuntansi PNP. Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan ISAK 35. AISTA, Program Studi Akuntansi PNP. <https://akuntansi.pnp.ac.id/aista/index.php/aista/article/download/11/6/78>. (Diakses pada tanggal 15 September 2025)
- [2] Ayuntari, C. G. 2025. Analisis penerapan ISAK No. 35 pada Yayasan Hati Gembira Indonesia (*Happy Hearts Indonesia*). *Akuntansiku: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 6(1), 15–28. <https://jurnal.akuntansiku.id/article/view/107>. (Diakses pada tanggal 15 September 2025)
- [3] Dewi, N. K. I. P. 2023. Penerapan ISAK 35 dalam penyajian laporan keuangan: Studi pada Yayasan Santha Yana. *Jurnal Akuntansi Universitas Warmadewa*, 5(2), 140–152. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juara/article/view/61433>. (Diakses pada tanggal 15 September 2025)
- [4] Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2020. Standar Akuntansi Keuangan Efektif Per 1 Januari 2020. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia. (Diakses pada tanggal 15 September 2025)
- [5] Jember Berbagi Berkah Bersama. 2023. Analisis penerapan ISAK 35: Studi kasus Yayasan Jember Berbagi Berkah Bersama. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Terapan*, 4(2), 72–84. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/balance/article/download/6547/pdf>. (Diakses pada tanggal 15 September 2025)
- [6] Kossay, E. 2025. Analisis penerapan ISAK 35 pada organisasi nirlaba (Studi kasus pada SD GMIM 4 Tondano). *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Manado*, 7(1), 55–67. <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/4311>. (Diakses pada tanggal 15 September 2025)
- [7] Mardiasmo. 2018. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset. (Diakses pada tanggal 15 September 2025)
- [8] Melia, Y. 2022. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan pada Organisasi Nirlaba: Literatur Review. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 5(1), 103. <https://ejurnal.poliban.ac.id/index.php/IJAAF/article/view/14340>. (Diakses pada tanggal 15 September 2025)
- [9] Nordiawan, D., & Hertianti, A. 2021. Akuntansi Sektor Publik: Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat. (Diakses pada tanggal 15 September 2025)
- [10] Pasaribu, R. 2022. Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba berdasarkan ISAK 35. *Jurnal Akuntansi Politeknik Raflesia*, 3(2), 47–58. <https://jurnal.politeknikraflesia.ac.id/index.php/jak/article/view/102>. (Diakses pada tanggal 15 September 2025)
- [11] Purba, S., & Manullang, N. 2023. Penerapan ISAK 35 tentang laporan keuangan organisasi non-laba pada Gereja GMI Effatha. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 9(2), 101–112. <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/pkm/article/download/4226/3397>. (Diakses pada tanggal 15 September 2025)

- [12] Rudianto. 2020. Akuntansi Manajemen dan Akuntansi Keuangan untuk Organisasi Nirlaba. Jakarta: Mitra Wacana Media. (Diakses pada tanggal 15 September 2025)
- [13] Setiadi, S. 2023. Implementasi ISAK 35 sebagai manifestasi sifat amanah pada organisasi non-laba. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik, 9(1), 25–36. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jbau/article/view/701>. (Diakses pada tanggal 15 September 2025)
- [14] Suwardjono. 2019. Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Yogyakarta: BPFE. (Diakses pada tanggal 15 September 2025)
- [15] Undiksha. Penerapan ISAK 35 dalam Penyajian Laporan Keuangan Yayasan Santha Yana. Jurnal JJA Undiksha. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/61433>. (Diakses pada tanggal 15 September 2025)